

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam sistem akuntansi pemerintahan di BPKAD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan langkah besar dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memfasilitasi seluruh tahapan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dengan lebih terintegrasi dan sistematis. Dengan fitur seperti validasi SPP dan SPM real-time, pengaturan jadwal, serta pengelolaan data pegawai dan akun bank, SIPD tidak hanya menyederhanakan proses administrasi tetapi juga meningkatkan ketertelusuran dan kontrol atas pelaksanaan anggaran. Implementasi ini juga memperkuat pelimpahan kewenangan serta penugasan kepada KPA, PA, dan PPTK secara lebih jelas, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara digital.
- 2) Penerapan SIPD juga dihadapkan pada sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi sistem. Tantangan utama meliputi keterbatasan literasi digital pegawai, gangguan teknis seperti sistem yang sering mengalami gangguan, serta infrastruktur perangkat dan jaringan yang belum memadai. Selain itu, perubahan regulasi SIPD yang berlangsung cepat tanpa sosialisasi yang memadai, serta belum optimalnya integrasi data antar-OPD menyebabkan beban kerja tambahan dan ketidaksinkronan informasi. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, serta koordinasi yang lebih efektif untuk mendukung keberhasilan SIPD secara menyeluruh.
- 3) Meskipun menghadapi berbagai kendala, SIPD tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat. Efisiensi tercapai melalui digitalisasi dan integrasi sistem yang

mempercepat alur kerja. Transparansi meningkat berkat keterbukaan akses informasi dan rekam jejak digital yang dapat diakses oleh berbagai pihak. Sementara itu, akuntabilitas diperkuat melalui dokumentasi digital pelimpahan wewenang dan proses pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri dengan jelas. Dengan pembaruan sistem secara berkala dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, SIPD memiliki potensi besar untuk menjadi pondasi utama tata kelola keuangan daerah yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab.

5.2 Saran

1) Kepada Pemerintah Daerah (Pemprov Sumatera Barat):

Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran guna memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kelancaran penggunaan SIPD. Hal ini termasuk pengadaan perangkat keras yang memadai dan peningkatan kapasitas jaringan internet agar sistem SIPD dapat berjalan tanpa hambatan, khususnya pada saat deadline pelaporan dan input data yang padat.

2) Kepada BPKAD Provinsi Sumatera Barat:

BPKAD disarankan untuk:

- Meningkatkan pelatihan teknis kepada seluruh pegawai secara berkala dan menyeluruh, terutama dalam menghadapi update fitur SIPD yang sering berubah tanpa sosialisasi resmi dari pusat.
- Menyusun standar operasional prosedur (SOP) internal yang rinci terkait implementasi SIPD agar seluruh unit kerja memiliki pedoman teknis yang seragam dalam melakukan input, validasi, dan pelaporan keuangan.
- Mendorong kolaborasi antarbidang dan antar-OPD untuk mengurangi ketidaksinkronan data dan memperkuat integrasi kerja berbasis sistem.

3) Kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri):

Kemendagri sebagai pengembang SIPD disarankan untuk:

- Menyediakan bimbingan teknis dan modul pelatihan daring setiap kali ada perubahan sistem SIPD.

- Menyusun panduan operasional resmi yang mudah diakses oleh seluruh pemerintah daerah agar transisi sistem baru dapat berjalan lebih mulus tanpa kebingungan pengguna.
- Meningkatkan respons teknis pusat terhadap gangguan sistem yang terjadi di daerah, khususnya pada saat-saat krusial seperti penutupan anggaran dan laporan keuangan.

4) Kepada OPD Lain di Lingkungan Pemprov Sumatera Barat:

Organisasi Perangkat Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPKAD dalam hal pengumpulan dan penginputan data ke SIPD. Setiap OPD harus memastikan bahwa data yang disampaikan kepada BPKAD sudah final dan valid, untuk meminimalisir koreksi berulang yang membebani kinerja sistem dan SDM.

5) Kepada Tenaga Teknis dan Operator SIPD:

Diperlukan peningkatan kompetensi literasi digital, baik secara mandiri maupun melalui pelatihan terstruktur. Operator SIPD juga disarankan untuk memiliki komitmen terhadap akuntabilitas dan disiplin penggunaan akun pribadi, mengingat setiap jejak digital pada SIPD bersifat terekam dan dapat diaudit.

